

NON TUNAI – PDAM – PENYERTAAN MODAL DAERAH
2016

PERDA KAB.SEMARANG NO.27, LD.2016NO.27 TLD.27, LL SETDA KAB.SEMARANG :
9HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN
SEMARANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG,
DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH PUSAT SECARA NON KAS

- ABSTRAK
- Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Semarang mendapatkan hibah non kas dari Pemerintah Pusat untuk penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat dan sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998; UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2009; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 52 Tahun 2012; Perda Prov. Jateng No 6 Tahun 1999; Perda Kab. Dati II Semarang No 3 Tahun 1989; Perda Kab. Semarang No 14 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan umum;

maksud dan tujuan; penyertaan modal; hak dan kewajiban; sanksi.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Nopember 2016.
- Penjelasan 2 Halaman.